

**KEPENTINGAN POLITIK DALAM PENYELESAIAN KEBAKARAN HUTAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Caroline Marcia Davinie Pakili¹, Ani Martini²
NPP. 32.0715**

*Asal Pendaftaran: Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

¹Email: 32.0715@praja.ipdn.ac.id ²animartini@ipdn.ac.id
Pembimbing Skripsi: Dr. Ani Martini, S.STP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Forest and land fires occur annually in Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan, and are influenced by the interests of certain political actors. The lack of regulation enforcement, political lobbying by companies, and weak coordination among stakeholders hinder effective resolution. **Purpose:** This study aims to analyze and describe political interests in forest fire resolution, identify supporting and inhibiting factors, and formulate effective strategies in Kotawaringin Barat Regency. **Method:** The study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The analysis technique used the Miles and Huberman model. SWOT analysis was used for strategy formulation. **Result:** Political interests dominate decision-making related to forest fire resolution. Supporting factors include strong local leadership, public participation, and national regulations. Inhibiting factors include weak coordination, limited funding, and disproportionate collaboration with private actors. The strategies proposed include strengthening multi-stakeholder collaboration, institutional reform, regulatory reinforcement, and increased public engagement. **Conclusion:** Political interests must be managed through inclusive, transparent policies and community involvement to effectively address forest fire issues.

Keywords: Political Interest; Forest Fires; Strategy; Kotawaringin Barat; Environmental Policy.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana tahunan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang dipengaruhi oleh kepentingan politik aktor tertentu. Lemahnya penegakan regulasi, lobi politik oleh perusahaan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kendala utama. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kepentingan politik dalam penyelesaian kebakaran hutan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi penyelesaian yang efektif di Kabupaten Kotawaringin Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman serta analisis SWOT untuk strategi. **Hasil/Temuan:** Kepentingan politik mempengaruhi pengambilan kebijakan penanggulangan kebakaran hutan. Faktor pendukung meliputi regulasi nasional, partisipasi masyarakat, dan komitmen pemerintah daerah. Faktor penghambat meliputi lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, dan dominasi aktor swasta.

Strategi yang dirumuskan yaitu penguatan kolaborasi multi-aktor, reformasi kelembagaan, penguatan regulasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. **Kesimpulan:** Kepentingan politik perlu dikelola melalui kebijakan yang inklusif, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat agar penyelesaian kebakaran hutan dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: Kepentingan Politik; Kebakaran Hutan; Strategi; Kotawaringin Barat; Kebijakan Lingkungan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Martini (2015:2), pemerintah daerah atau *local government* merujuk pada keberadaan suatu kekuasaan atau *authority* dari unit pemerintahan yang berdiri sendiri maupun yang bersifat dependen, yang dibentuk atas persetujuan parlemen untuk memberikan pelayanan serta mewakili kepentingan umum (*general interest*) suatu wilayah tertentu, di bawah kepemimpinan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan sumber daya lokal. Kewenangan ini memungkinkan mereka lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan khas wilayahnya. Dalam konteks penanganan kebakaran hutan, desentralisasi menjadi sangat relevan karena setiap daerah memiliki karakteristik ekologi dan dinamika sosial yang berbeda-beda. Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai salah satu daerah rawan karhutla, perlu merumuskan kebijakan penanggulangan yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Lebih lanjut, Martini (2017:2) menegaskan bahwa pemerintahan tidak hanya dijalankan pada level nasional, tetapi juga dioperasionalkan ke dalam struktur yang lebih spesifik melalui pemerintahan daerah. Pemerintahan merupakan bagian integral dari hubungan antara individu dan negara, yang dijalankan melalui mekanisme organisasi dan manajemen pemerintahan. Dalam pandangan Martini (2019), organisasi dan manajemen pemerintahan adalah sistem yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien di berbagai tingkat administrasi.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang setiap tahun mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fenomena ini telah menjadi persoalan krusial karena berdampak pada lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, seperti perusahaan perkebunan besar (Riyaldi, 2020). Praktik ini telah berlangsung lama dan menjadi semacam kebiasaan yang sulit dihentikan, terutama karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah.

Kondisi geografis Kotawaringin Barat yang memiliki lahan gambut luas menjadikannya rentan terhadap kebakaran. Saat musim kemarau tiba, potensi terjadinya karhutla semakin tinggi. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatasi permasalahan ini, mulai dari pelarangan pembakaran lahan hingga penetapan status darurat bencana. Namun, kenyataannya kebakaran terus berulang. Ini menunjukkan bahwa permasalahan karhutla tidak

semata-mata bersifat teknis, melainkan juga melibatkan faktor-faktor politik dan struktural.

Dalam praktiknya, penyelesaian kebakaran hutan seringkali tersendat akibat adanya tarik-menarik kepentingan politik antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan aktor lokal lainnya. Pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis: di satu sisi memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan, namun di sisi lain perlu menjaga hubungan baik dengan para pelaku usaha yang kerap memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang diambil cenderung tidak tegas, atau bahkan terkesan melakukan pembiaran. Seperti yang dikemukakan oleh Wilson (1980) dalam bukunya *The Politics of Regulation*, regulasi merupakan proses di mana pemerintah berusaha mengatur atau mengendalikan aktivitas ekonomi yang berdampak terhadap kesejahteraan publik. Dalam konteks kebakaran hutan, regulasi yang seharusnya menjadi instrumen kontrol justru sering kali dilemahkan oleh kompromi politik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih bersifat simbolis daripada substantif.

Kepentingan politik juga memengaruhi alokasi anggaran, koordinasi antarlembaga, serta pengambilan keputusan dalam kebijakan penanggulangan karhutla. Dahl (1989) dalam (Tebaldi & Calaresu, 2016) mengemukakan bahwa kepentingan politik dapat dilihat sebagai faktor yang mendorong aktor politik untuk mengembangkan kebijakan tertentu guna memenuhi kebutuhan kelompok mereka. Misalnya, pejabat yang memiliki kedekatan dengan perusahaan cenderung enggan menindak tegas pelanggaran pembakaran lahan. Selain itu, penunjukan pejabat sementara (Pj) kepala daerah juga memengaruhi keberlanjutan kebijakan, karena pejabat tersebut memiliki keterbatasan wewenang dan durasi jabatan yang singkat, sehingga tidak mampu melakukan intervensi kebijakan yang strategis.

Di sisi lain, masyarakat dan organisasi non-pemerintah telah menunjukkan upaya aktif dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya melalui kegiatan pencegahan dan edukasi lingkungan. Namun, partisipasi tersebut sering kali tidak berjalan optimal karena minimnya dukungan dari pemerintah maupun sektor swasta. Ketimpangan dalam kerja sama antara sektor publik dan privat turut memperburuk upaya kolaboratif yang seharusnya menjadi landasan penyelesaian karhutla secara komprehensif. Chambers (1997), dalam bukunya *Whose Reality Counts?*, menekankan pentingnya konsep “partisipasi yang memberdayakan” (*empowering participation*), yaitu bentuk partisipasi yang memberikan masyarakat kontrol lebih besar atas proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, pelibatan masyarakat dalam penanggulangan karhutla harus diposisikan sebagai subjek aktif, bukan sekadar pelengkap kebijakan formal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk memahami lebih dalam bagaimana kepentingan politik mempengaruhi proses penyelesaian kebakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini berupaya mengungkap keterkaitan antara kepentingan politik dan efektivitas penyelesaian karhutla serta merumuskan strategi penanganan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan agar bencana tahunan ini tidak terus berulang.

1.2 Kesenjangan Masalah (GAP)

Berbagai kebijakan teknis telah diterapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, namun sebagian besar belum menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.

Fokus utama penanganan selama ini cenderung pada upaya reaktif seperti pemadaman api dan peningkatan infrastruktur pemantauan. Padahal, permasalahan utama kebakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat juga melibatkan dimensi politik, khususnya adanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha yang mengelola lahan berskala besar.

Kesenjangan yang nyata terletak pada belum banyaknya penelitian yang secara eksplisit menyoroti bagaimana kepentingan politik memengaruhi penyelesaian kebakaran hutan di tingkat daerah. Hal ini penting untuk diteliti karena relasi antara aktor pemerintah dan swasta sering kali menjadi penghambat dalam implementasi regulasi. Pemerintah daerah menghadapi tekanan untuk melindungi kepentingan investor, yang berkontribusi pada perekonomian daerah namun juga menjadi penyebab utama kebakaran hutan.

Penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam hubungan antara kepentingan politik, pengambilan keputusan, dan kebijakan penyelesaian karhutla. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai faktor-faktor non-teknis yang berpengaruh dalam pengelolaan bencana lingkungan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama oleh Teofilus Fredrik Mogot & Frederik Samuel Papilaya (2018), Perancangan dan implementasi system informasi geografis untuk monitoring persebaran titik api kebakaran hutan berbasis *Google Maps* API (repository Universitas Kristen Satya Wacana) dengan hasil penelitian pemerintah merancang Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memantau titik api kebakaran hutan di Kotawaringin Barat. Persamaannya sama-sama meneliti kebakaran hutan di Kotawaringin Barat, menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan perbedaan dimana penelitian ini berokus pada teknologi pemantauan kebakaran, bukan pada aspek politik dan kebijakan.

Penelitian yang kedua oleh Alexander Ambarita (2021), Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka melindungi pemukiman masyarakat di kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah (jurnal IPDN) dengan hasil penelitian Peran BPBD dalam pencegahan kebakaran hutan melalui koordinasi dengan berbagai pihak dan penyediaan sarana prasarana. Persamaannya sama-sama Meneliti kebakaran hutan dan pencegahannya, menggunakan metode pendekatan kualitatif dan perbedaannya penelitian ini Menitikberatkan pada langkah pencegahan, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada kepentingan politik.

Penelitian yang ketiga oleh Arman Nur Ikhsan, Danang Sri Hadmoko, & Prima Widayani (2022), Kajian kerawanan lingkungan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Repository Universitas Gajah Mada) hasil penelitiannya pemerintah memetakan kerawanan lingkungan dan strategi restorasi gambut untuk pencegahan kebakaran hutan di Kotawaringin Barat. Persamaan keduanya Sama-sama menganalisis kebakaran hutan di Kotawaringin Barat, namun mempunyai perbedaan dimana penelitian ini Berbasis analisis kerawanan lingkungan, bukan pada dinamika politik, Pemodelan spasio-temporal dengan *Information Value*.

Penelitian yang keempat oleh Christine Triana Singarimbun (2016), Peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian kebakaran hutan tahunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup (studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat) (Repository Universitas Brawijaya) dengan hasil penelitian Peran Pemda dalam pengendalian kebakaran hutan tahunan melalui pemantauan dan regulasi. Persamaan keduanya yaitu sama-sama menyoroti kebakaran hutan di Kotawaringin Barat, menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu penelitian ini Berfokus pada implementasi pengendalian oleh pemerintah, sementara penelitian yang akan diteliti lebih pada analisis kepentingan politik.

Penelitian yang terakhir oleh Beni Iskandar & Nanang Hanafi (2022), *Alogaritma Machine Learning* deteksi deforestasi hutan hujan tropis di Kabupaten Kotawaringin Barat (Jurnal Teknologi Informasi, Komputer dan Aplikasinya (JTika), Universitas Palangkaraya) dimana hasil penelitiannya pemerintah mengukur deforestasi hutan hujan tropis di Kotawaringin Barat dengan tingkat akurasi tinggi menggunakan ML. Persamaan keduanya sama-sama terkait kebakaran dan kerusakan hutan di Kotawaringin Barat, kemudian perbedaannya penelitian ini berfokus pada algoritma deteksi deforestasi, bukan pada aspek kebijakan atau politik, Machine Learning (Random Forest, CART, SVM).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap kepentingan politik sebagai determinan utama dalam keberhasilan atau kegagalan penyelesaian kebakaran hutan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dengan mengintegrasikan analisis SWOT dalam merumuskan strategi penyelesaian yang berbasis pada kondisi riil di lapangan.

Selain itu, penelitian ini mengkaji peran pejabat kepala daerah sementara (Pj) dalam mengelola isu kebakaran hutan, suatu aspek yang selama ini jarang dibahas dalam literatur ilmiah. Keterbatasan wewenang dan masa jabatan yang pendek menyebabkan Pj sulit menginisiasi kebijakan strategis jangka panjang. Aspek ini memperkaya wacana tentang keterbatasan struktural dalam pemerintahan daerah.

Penelitian ini juga menawarkan solusi berbasis kolaborasi antarsektor dengan memperhatikan ketimpangan kekuasaan antara sektor publik dan swasta. Dengan demikian, hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teori kepentingan politik dan implementasinya dalam pengelolaan sumber daya alam.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis bagaimana kepentingan politik mempengaruhi proses penyelesaian kebakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian kebakaran hutan dan juga untuk merumuskan strategi penyelesaian kebakaran hutan yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami dan memahami fenomena sosial-politik secara holistik dalam konteks penyelesaian kebakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap secara mendalam dinamika kepentingan politik yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan karhutla.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang dikenal sebagai salah satu daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada intensitas kejadian karhutla yang tinggi serta kompleksitas aktor yang terlibat, baik dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat lokal.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci seperti pejabat pemerintah daerah (BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sekretariat Daerah), tokoh masyarakat, perwakilan perusahaan perkebunan, dan aktivis lingkungan. Observasi dilakukan terhadap aktivitas penanggulangan kebakaran, koordinasi lintas sektor, serta pengamatan terhadap kondisi lapangan. Dokumentasi digunakan untuk menelaah data sekunder seperti laporan tahunan, berita media lokal, dan dokumen kebijakan terkait.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Sugiyono dalam bukunya "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (2018, hal 330), triangulasi adalah teknik analisis data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks tematik untuk mempermudah analisis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mempertimbangkan pola-pola temuan dan hubungan antar-variabel yang ditemukan di lapangan.

Untuk merumuskan strategi penyelesaian, digunakan analisis SWOT dari Tunggal, 2001 (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan. Hasil analisis SWOT digunakan untuk merumuskan alternatif strategi yang dapat diterapkan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kompleksitas kepentingan politik dalam penyelesaian kebakaran hutan dan memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi para pemangku kepentingan di daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kepentingan Politik dalam Proses Penyelesaian Kebakaran Hutan

Kepentingan politik memainkan peran sentral dalam proses penyelesaian kebakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini menemukan bahwa relasi kekuasaan antara pejabat daerah dan pelaku usaha perkebunan turut menentukan keberpihakan kebijakan. Misalnya, sejumlah pejabat daerah tampak enggan mengambil langkah tegas terhadap pelaku pembakaran lahan yang merupakan donatur politik pada pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Kondisi ini menciptakan dilema antara kebutuhan untuk menjaga hubungan dengan mitra politik dan kewajiban untuk menegakkan regulasi lingkungan. Akibatnya, terdapat ketidaktegasan dalam penegakan hukum dan lemahnya pelaksanaan kebijakan preventif. Dalam konteks ini, pejabat kepala daerah, khususnya yang berstatus sebagai Penjabat (Pj), menghadapi keterbatasan kewenangan sehingga tidak mampu melakukan reformasi kebijakan secara menyeluruh.

Lebih jauh, kepentingan politik juga memengaruhi arah anggaran dan prioritas kebijakan. Penanganan kebakaran hutan sering kali tidak masuk dalam agenda utama politik daerah, karena tidak memberikan keuntungan elektoral secara langsung. Akibatnya, banyak program mitigasi yang berjalan setengah hati dan hanya aktif ketika musim kemarau telah tiba.

Selain itu, ada kecenderungan kebijakan lingkungan dikompromikan dengan kepentingan investor besar. Perusahaan yang memiliki kekuatan ekonomi dan kedekatan dengan elite politik lokal kerap mendapatkan perlakuan istimewa dan lolos dari sanksi administratif maupun pidana. Hal ini memperparah krisis lingkungan dan memperlemah legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat

3.2 Faktor Pendukung dalam Penyelesaian Kebakaran Hutan

Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang dapat mendukung penyelesaian kebakaran hutan secara efektif. Salah satunya adalah regulasi nasional yang cukup kuat, seperti Inpres No. 3 Tahun 2020, yang mewajibkan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Regulasi ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi yang terstruktur.

Dukungan dari masyarakat juga menjadi elemen penting. Di beberapa desa, masyarakat secara aktif melaporkan titik api dan terlibat dalam kegiatan pemadaman bersama. Keberadaan LSM lingkungan turut memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko kebakaran secara lokal. Hal ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberdayakan, efektivitas penanganan bencana dapat meningkat.

Selain itu, teknologi pemantauan berbasis satelit yang digunakan oleh BPBD dan KLHK sangat membantu dalam deteksi dini. Data hotspot yang diperoleh secara real-time memungkinkan tindakan cepat sebelum kebakaran meluas. Teknologi ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas karena dapat diakses publik.

Dukungan politik dari pejabat teknis dan beberapa anggota DPRD yang berpihak pada kepentingan lingkungan juga dapat menjadi penggerak perubahan. Mereka menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan kondisi riil di lapangan, sekaligus mendorong keterlibatan semua sektor dalam perumusan kebijakan penyelesaian kebakaran hutan.

Tabel 1. Faktor Pendukung

No	Faktor Pendukung	Keterangan
1	Komitmen Pemerintah Daerah	Terdapat kemauan politik di tingkat OPD
2	Partisipasi Masyarakat	Pelibatan warga dalam deteksi dini
3	Dukungan Regulasi Nasional	Inpres No. 3 Tahun 2020 menjadi acuan
4	Kolaborasi Lintas Sektor	Koordinasi antara BPBD, DLH, dan TNI

3.3 Faktor Penghambat Penyelesaian Kebakaran Hutan

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat serius. Lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) menjadi penghambat utama. Tumpang tindih kewenangan antara instansi teknis seperti BPBD, DLH, dan Dinas Perkebunan menyebabkan kebijakan menjadi tidak sinkron dan pelaksanaannya kurang optimal.

Minimnya anggaran juga menjadi kendala. Penanganan kebakaran membutuhkan sumber daya besar, mulai dari alat pemadam hingga pelatihan masyarakat. Namun, alokasi anggaran masih rendah dan kerap dikorbankan untuk kepentingan program-program lain yang lebih populis secara politik.

Ketimpangan hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha juga menjadi hambatan. Banyak perusahaan besar yang tidak memiliki komitmen lingkungan dan justru memanfaatkan celah hukum untuk melakukan pembakaran lahan secara sistematis. Sayangnya, aparat penegak hukum tidak dapat bertindak maksimal karena tekanan politik dan ekonomi.

Penempatan Pj kepala daerah yang bersifat sementara dan tidak memiliki dasar legitimasi elektoral memperlemah proses pengambilan kebijakan strategis. Mereka cenderung mengambil kebijakan yang aman secara politik dan tidak konfrontatif, sehingga tidak berani menindak perusahaan besar yang menjadi penyebab utama kebakaran.

Tabel 2. Faktor Penghambat

No	Faktor Penghambat	Keterangan
1	Lemahnya Koordinasi Lintas OPD	Kurangnya forum tetap penanganan karhutla
2	Keterbatasan Anggaran	Anggaran BPBD dan DLH terbatas
3	Ketimpangan Hubungan dengan Swasta	Ketergantungan ekonomi pada perusahaan
4	Pj Kepala Daerah	Kewenangan terbatas, tidak bisa reformatif

3.4 Strategi Penyelesaian Kebakaran Hutan

Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang dapat diterapkan adalah penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pembentukan forum permanen lintas OPD dan pelibatan sektor swasta. Forum ini harus diatur melalui regulasi daerah agar memiliki dasar hukum yang kuat dan menjamin keberlanjutan lintas periode pemerintahan.

Strategi lainnya adalah reformasi kelembagaan dengan memperjelas struktur komando penanggulangan karhutla. Hal ini mencakup penunjukan satuan kerja utama yang bertanggung jawab atas koordinasi lintas sektor serta evaluasi kinerja tahunan berbasis indikator keberhasilan.

Optimalisasi teknologi pemantauan juga harus menjadi prioritas. Penggunaan drone, satelit, dan dashboard digital berbasis spasial harus diperluas ke tingkat desa dan kecamatan. Teknologi ini akan mempercepat deteksi dini dan memperkuat pelibatan masyarakat dalam pengawasan lapangan.

Strategi terakhir adalah peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan insentif berbasis kinerja. Pemerintah daerah dapat membuat program “Desa Siaga Karhutla” dengan dukungan anggaran khusus yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan secara mandiri dan berkelanjutan.

3.5 Diskusi Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat teori Harvey (2005) tentang kekuasaan dan kontrol atas sumber daya. Dalam konteks Kotawaringin Barat, kekuasaan digunakan untuk mempertahankan dominasi ekonomi tertentu dengan mengorbankan keberlanjutan ekologis. Politik lokal lebih condong pada akomodasi kepentingan investor dibandingkan keberpihakan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan institusional dalam mengatur dan mengendalikan relasi antara negara dan pasar. Penanganan kebakaran hutan akan tetap menjadi siklus tahunan selama kebijakan tidak diarahkan untuk memperbaiki relasi kuasa tersebut. Ini menegaskan pentingnya pendekatan politik ekologis dalam merumuskan solusi jangka panjang.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada keberanian politik pemerintah daerah untuk mengambil keputusan strategis dan membangun sistem akuntabilitas yang kuat. Tanpa itu, semua strategi teknis akan berakhir sebagai formalitas administratif tanpa dampak riil di lapangan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepentingan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penyelesaian kebakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Aktor-aktor politik lokal, termasuk kepala daerah dan pejabat teknis, sering kali berada dalam posisi dilematik antara menegakkan regulasi dan menjaga hubungan dengan pihak perusahaan yang memiliki kepentingan

ekonomi dan afiliasi politik. Ketimpangan relasi kekuasaan ini menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan yang tegas dan berkelanjutan.

Faktor pendukung seperti adanya regulasi nasional, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor telah tersedia dan menjadi kekuatan potensial dalam penanggulangan kebakaran hutan. Namun, faktor penghambat seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, serta dominasi aktor swasta tetap menjadi tantangan besar. Strategi penyelesaian berbasis analisis SWOT yang dirumuskan dalam penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, dan penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai solusi jangka panjang.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan dari sisi cakupan wilayah dan waktu. Fokus hanya pada satu daerah yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat menyebabkan hasil belum tentu dapat digeneralisasikan untuk daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, keterbatasan waktu pengumpulan data membuat beberapa informasi lapangan tidak dapat dieksplorasi secara lebih mendalam, terutama yang berkaitan dengan pengaruh struktural dalam relasi politik dan ekonomi antara pemerintah dan swasta. Penelitian ini juga belum mengkaji secara kuantitatif dampak langsung dari intervensi kebijakan terhadap penurunan titik api atau luas area terbakar. Penelitian lanjutan dengan pendekatan mixed-method sangat direkomendasikan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (future work), Arah masa depan penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola lingkungan yang adil dan partisipatif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam efektivitas perda atau kebijakan daerah dalam menekan angka kebakaran hutan secara kuantitatif, serta mengevaluasi pelaksanaan regulasi melalui studi longitudinal. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji bagaimana dinamika politik elektoral dan pembiayaan kampanye kepala daerah berperan dalam menentukan arah kebijakan lingkungan. Studi lintas daerah juga penting untuk dilakukan agar dapat dibandingkan efektivitas pendekatan penanganan karhutla di berbagai wilayah dengan struktur kekuasaan dan relasi sosial-politik yang berbeda.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing serta para Dosen Penguji yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam segala rangkaian penyelesaian skripsi ini. Tak lupa juga diucapkan terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Kotawaringin serta seluruh informan yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, juga seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, A. (2021). Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka melindungi pemukiman masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Tatapamong*, 56-78. [10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1812](https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1812)
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts?: Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications. https://books.google.co.id/books?id=BGyAA0UU_70C
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press. https://books.google.co.id/books?id=Ghwr_kmPgUsC
- Ikhsan, A. N., Hadmoko, D. S., & Widayani, P. (2023). Spatial Modeling of Forest and Land Fire Susceptibility Using the Information Value Method in Kotawaringin Barat Regency, Indonesia. *Fire*, 6(4), 170. <https://doi.org/10.3390/fire6040170>
- Iskandar, B., & Hanafi, N. (2022). Algoritma machine learning deteksi deforestasi hutan hujan tropis di kabupaten kotawaringin barat. *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, dan Aplikasinya (JTika)*, 4(2), 194-201. <https://doi.org/10.29303/jtika.v4i2.205>
- Martini, A., Suradinata, E., Kusworo, K., Lambelanova, R., & Thahir, M. I. (2019). The Effect of Organizational Transformation, Compensation and Organizational Culture on Performance of Regional Government Bureaucracy in Sumedang Regency West Java Province. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(1), 236. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i1.14439>
- Martini, Ani. (2017). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS)
- Riyadli, H., & Palangkaraya, A. S. (2019). Sistem Informasi Respon Cepat Penanganan Kebakaran Lahan Gambut Kota Palangka Raya. *SPEED-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, 12(1). <http://speed.web.id/jurnal/index.php/speed/article/view/623>.
- Singarimbun, C. triana. (2016). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Tahunan Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat)* [Universitas Brawijaya].

<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/119135/>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tahir, M. I., & Martini, A. (2015). *Mendesain Organisasi Perangkat Daerah yang Efisien dan Efektif*. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Tebaldi, M., & Calaresu, M. (2016). The Pursuit of Quality: Assessing Democracies... to Save Democracy? *Open Journal of Political Science*, 06(01), 1–9.
<https://doi.org/10.4236/ojps.2016.61001>

Tunggal, Amin Wijaya, 2001. *Tanya Jawab Manajemen Pemasaran Internasional*, Harvarindo, Jakarta

Wilson, J. Q. (1980). *The Politics of regulation*. Basic Books.
<https://books.google.co.id/books?id=SxOGt8sAQa0C>

